



LKJIP

(LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kota Semarang Tahun 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2017 ini dapat tersusun.

LKjIP Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Bappeda Kota Semarang atas penggunaan anggaran di tahun 2017. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan dari LKjIP Bappeda Kota Semarang ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang, realisasi indikator kinerja Bappeda Kota Semarang, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan sesuai dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Bappeda Kota Semarang ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Bappeda Kota Semarang dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan pembangunan daerah di Kota Semarang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

 A. Latar Belakang I-1

 B. Gambaran Umum Bappeda Kota Semarang I-2

 C. Permasalahan UtamaBappeda Kota Semarang I-13

 D. Sistematika Penulisan I-14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... II-1

 A. Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang II-1

 B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang ... II-7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

 A. Capaian Kinerja Bappeda Kota Semarang III-1

 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bappeda Kota Semarang III-3

 C. Akuntabilitas Keuangan Bappeda Kota Semarang III-17

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PegawaiASN dan Non ASN BappedaKota Semarang Tahun 2017 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	I-7
Tabel 1.2	Jumlah PegawaiASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 Berdasarkan Golongan / Ruang	I-8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	I-9
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	I-10
Tabel 1.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	I-11
Tabel 2.1	Matriks Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target KinerjaBappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	II-3
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	II-6
Tabel 2.3	Perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.....	II-7
Tabel 2.4	Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	II-8
Tabel 3.1	CapaianIndikator Kinerja UtamaBappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-1
Tabel 3.2	CapaianIndikatorpada Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-2
Tabel 3.3	Rincian Capaian Indikator Tujuan Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang (Realisasi IndikatorTujuan Bappeda Kota Semarang) Tahun 2017.III-3	
Tabel 3.4	Rincian Capaian Indikator Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang (Realisasi Indikator1 SasaranBappeda Kota Semarang) Tahun 2017.....	III-4
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-6
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-7
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-7
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-8
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Program Pengembangan Data dan Informasi pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	III-8

Tabel 3.10 Realisasi Indikator Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017..... III-9

Tabel 3.11 Realisasi Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017..... III-11

Tabel 3.12 Realisasi Indikator Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017..... III-12

Tabel 3.13 Realisasi Indikator Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017..... III-14

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Program Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 III-15

Tabel 3.15 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2017..... III-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang I-6

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun
2017Berdasarkan Jenjang Pendidikan I-8

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Golongan/Ruang I-9

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017yang
Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional
Umum I-10

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk itu Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Semarang, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, yang terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsinya sendiri di bidang perencanaan. Untuk itu Bappeda Kota Semarang akan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2017 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA SEMARANG

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, disebutkan bahwa Bappeda merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Mendasarkan pada peraturan ini, maka Bappeda bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dimana disebutkan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Selain perubahan pada tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, juga terjadi perubahan susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Sub Bidang Perencanaan Pemerintah, Sub Bidang Perencanaan Sosial, dan Sub Bidang Perencanaan Budaya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial;
- 3) Sub Bidang Perencanaan Budaya.

d. Bidang Perencanaan Perekonomian

Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha, Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi dan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro.

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
- 3) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro.

e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air dan Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air;
- 3) Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.

f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi

Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah, Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah, dan Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan.

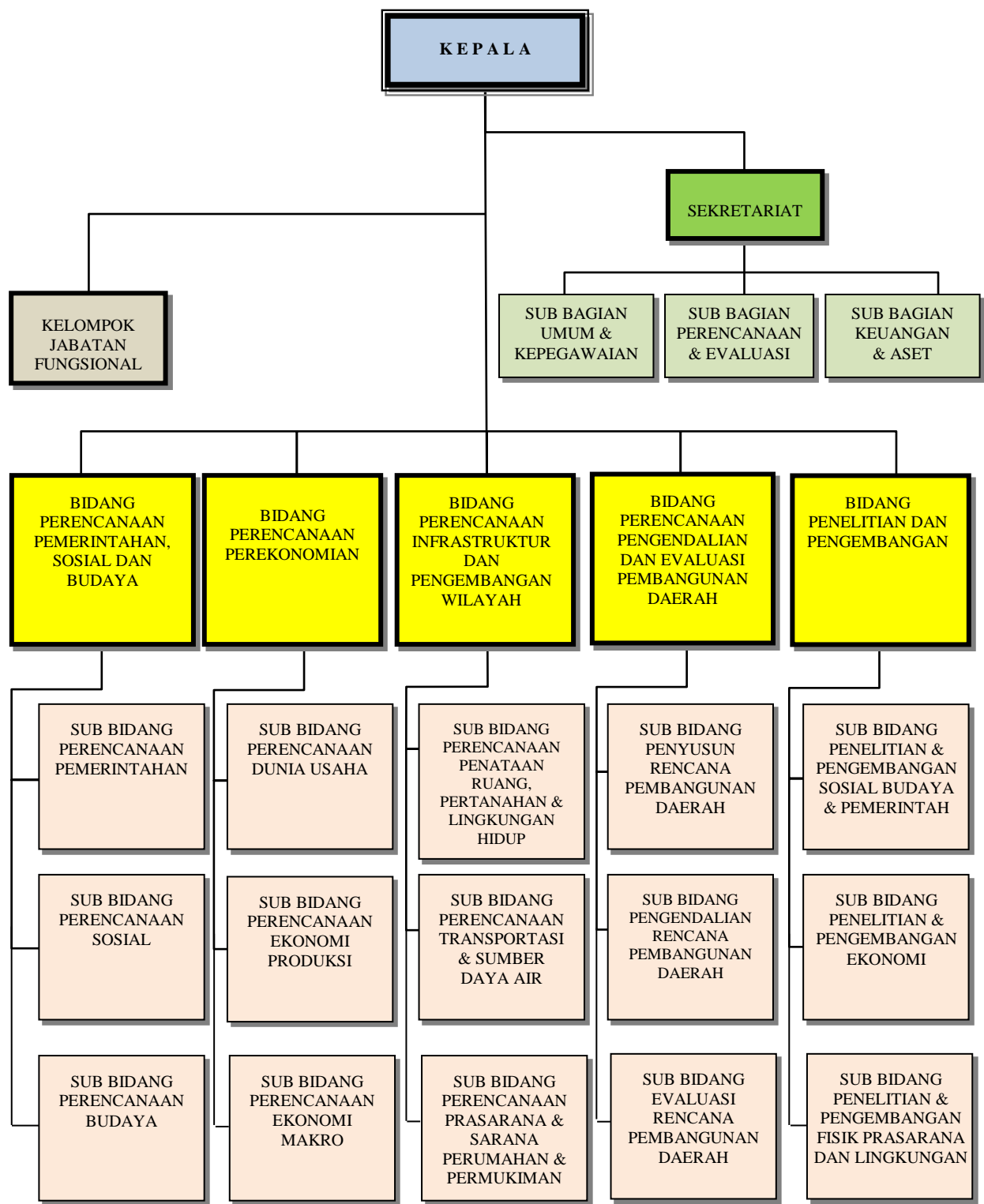
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah;
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;
- 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Bappeda Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG



Gambar 1.1
Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kota Semarang pada Desember 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 71 pegawai, yang terdiri dari 35 pegawai laki-laki (49,30 %) dan 36 pegawai perempuan (50,70 %). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 4 pegawai, yang terdiri dari 1 pegawai Non ASN laki-laki (25,00 %) dan 3 pegawai Non ASN perempuan (75,00 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Semarang adalah sebanyak 75 pegawai.

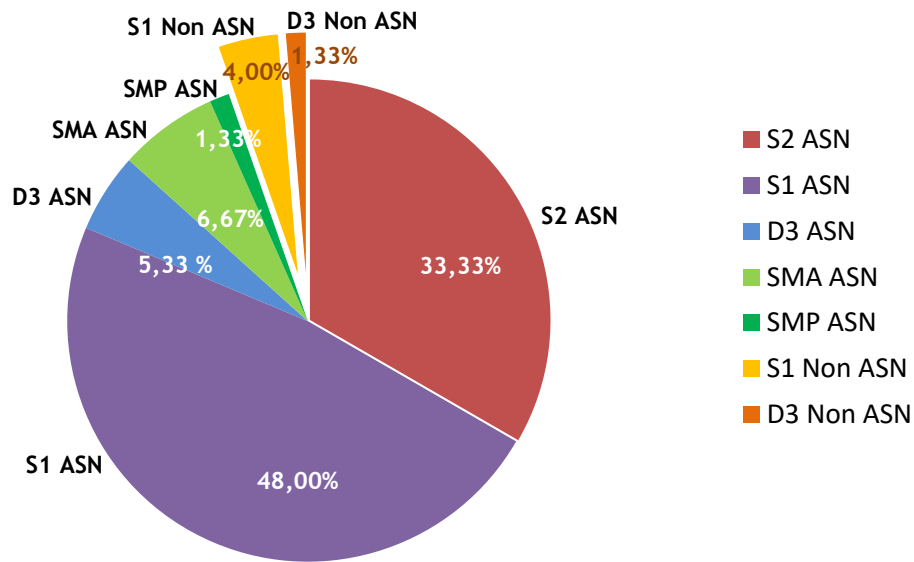
Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 65 orang (91,55 %). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 6 orang (8,45 %). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, hanya 1 orang (25,00 %) yang merupakan lulusan D3, sisanya (75,00 %) merupakan lulusan S1.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	65	91,55	86,67	4	100,00	5,33
1.	S2	25	35,21	33,33	0	0,00	0,00
2.	S1	36	50,70	48,00	3	75,00	4,00
3.	D3	4	5,64	5,33	1	25,00	1,33
	Bukan Perguruan Tinggi	6	8,45	8,00	0	0,00	0,00
4.	SMA	5	7,04	6,67	0	0,00	0,00
5.	SMP	1	1,41	1,33	0	0,00	0,00
Jumlah		71	100,00	94,67	4	100,00	5,33
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		75 pegawai					

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017



Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

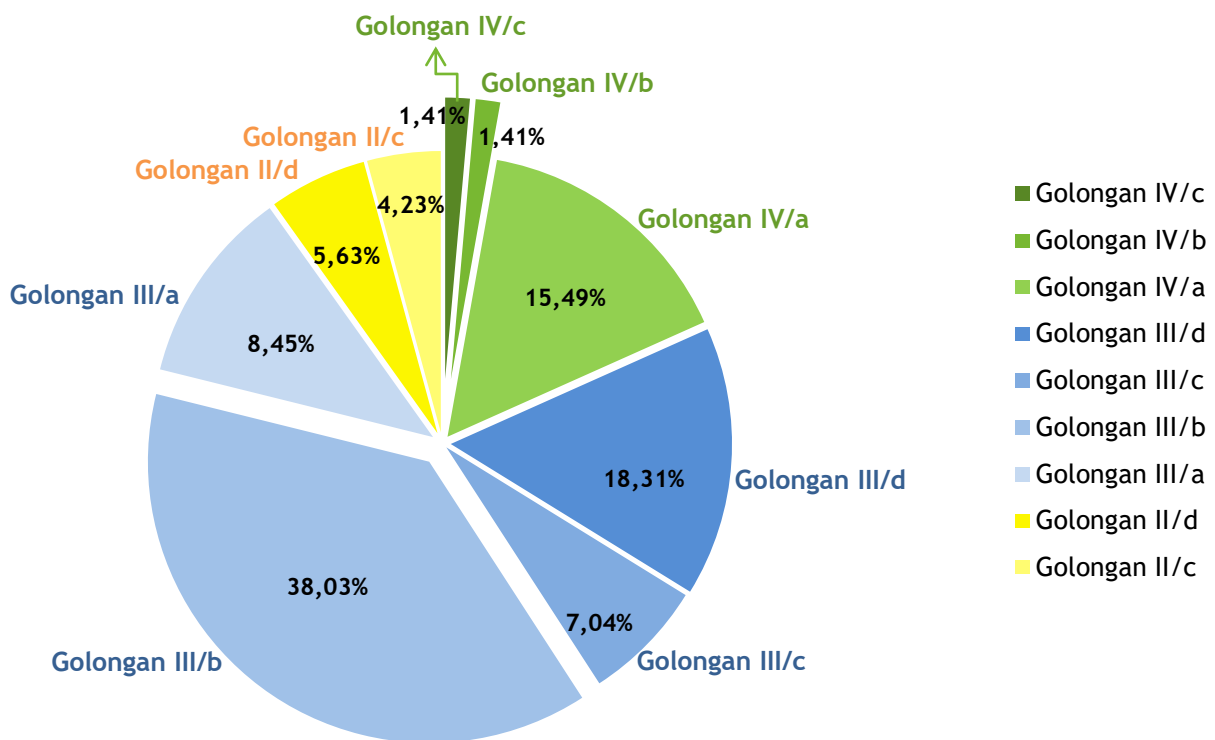
Gambar 1.2
Komposisi Pegawai ASN & Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 71 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 13 pegawai (18,31 %), golongan III sebanyak 51 pegawai (71,83 %), dan golongan II sebanyak 7 pegawai (9,86 %), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	13	18,31
	IV/c	1	1,41
	IV/b	1	1,41
	IV/a	11	15,49
2.	Golongan III	51	71,83
	III/d	13	18,31
	III/c	5	7,04
	III/b	27	38,03
	III/a	6	8,45
3.	Golongan II	7	9,86
	II/d	4	5,63
	II/c	3	4,23
JUMLAH		71	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017



Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

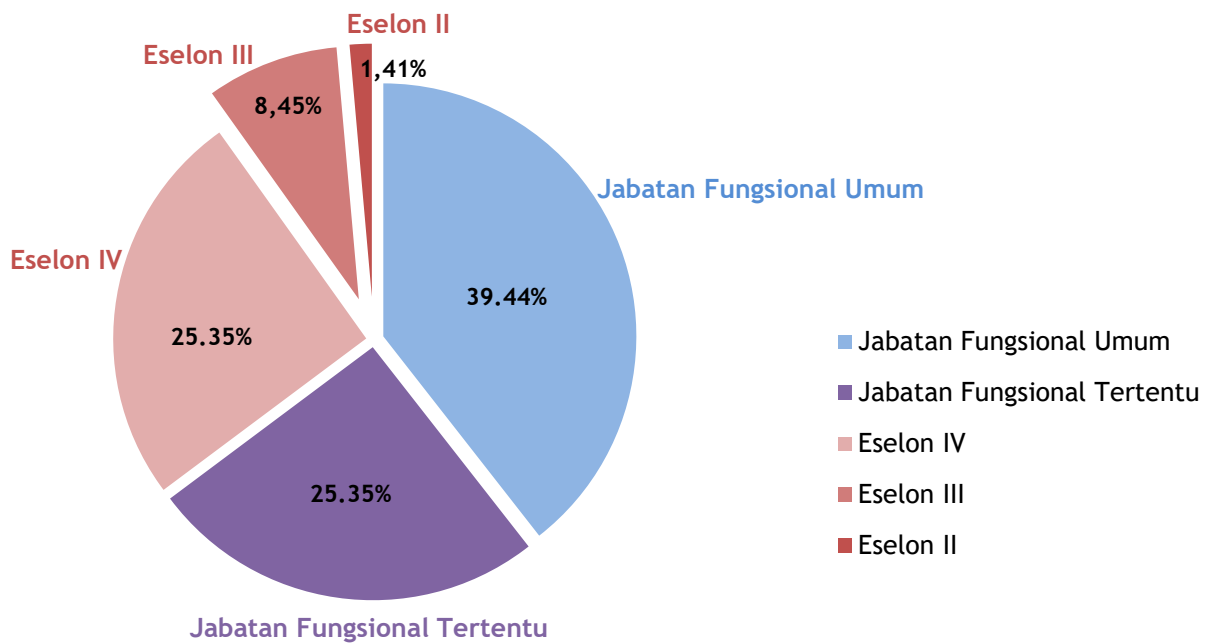
Gambar 1.3
Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Golongan / Ruang

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 71 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (1,41 %) yang menduduki eselon II, 6 pegawai (8,45 %) yang menduduki eselon III, 18 pegawai (25,35%) yang menduduki eselon IV, 18 pegawai (25,35 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 28 pegawai (39,44 %) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Eselon II	1	1,41
2.	Eselon III	6	8,45
3.	Eselon IV	18	25,35
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	18	25,35
5.	Jabatan Fungsional Umum	28	39,44
JUMLAH		71	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017



Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

Dari 18 pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut di atas, 14 orang (77,78 %) memiliki Jabatan Fungsional Perencana, 1 orang (5,56 %) memiliki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, 1 orang (5,56 %) memiliki Jabatan Fungsional Arsiparis, serta 2 orang (11,11 %) memiliki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 71 pegawai ASN sebanyak 18 pegawai (25,35 %) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	ADUM / Diklat Pim IV	12	16,90
2.	SPAMA / Diklat Pim III	5	7,04
3.	SPAMEN / Diklat Pim II	1	1,41
JUMLAH		18	25,35

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

4. Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappeda Kota Semarang. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Bappeda Kota Semarang berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

No	Jenis Barang	Jumlah
	Sarana Transportasi	
1	Roda 4	8
2	Roda 2	21
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telepon Lokal	10
2	Telepon Langsung	5
3	Faximile	4
	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	
1	Komputer	53
2	OHP	1
3	Laptop	60
4	Monitor	10
5	UPS	7
6	Printer	51
7	LCD Proyektor	11
8	Meja ½ Biro17	17
9	Mesin Ketik	16
10	Filling Cabinet Kayu	8
11	Plotter	1
12	White Board	3
13	Meja Rapat Kaca	3
14	Meja Rapat	19
15	Meja Ketik	5
16	Meja Resepsionis	2
17	Meja Samping	20
18	Meja Kursi Tamu	3
19	Meja Komputer	21
20	Meja Pimpinan	1
21	Meja Biro	20
22	Meja Staf	87
23	Kursi Putar	20
24	Kursi Staf	73
25	Kursi Putar Pimpinan	11
26	Kursi Putar Eselon IV	11
27	Kursi Rapat Ka	8
28	Kursi Hadap	9
29	Almari Buffet	1
30	Alamari buffet Kaca	1

No	Jenis Barang	Jumlah
31	Almari Arsip Besar	2
32	Almari Besar Dinding	3
33	Filling Kabinet Besi	12
34	Almari Besi	31
35	Wireless TOA	2
36	Almari Gambar	2
37	Kabel Audio	160 mt
38	Kipas Angin Berdiri	5
39	Televisi	8
40	Cassette Recorder	1
41	Panaboard	2
42	Kursi Lipat	66
43	AC Unit	9
44	HandyCam	1
45	Kamera Digital	12
46	Tangga (B1)	1
47	Dispenser	7
48	N komputing	3
49	Almari besi Mobile	2
50	Screen Motorized	2
51	Buku	146
52	Filing cabinet Besi (data file)	1
53	Meja Conter	1
54	Meja Eselon IV	1
55	Wireless presenter (Logitec)	5
56	Kursi Rapat	86
57	Layar Proyektor	9
58	Net Computing L230	2
59	Kursi Kerja Pimpinan	3
60	Troli	2
61	Rak TV	1
62	Kulkas/ Lemari Es	2
63	TV Plasma 43 Inch	1
64	Dri Cabinet	1
65	Cash Box	2
66	Penghancur Kertas	3
67	Brankas	2
68	Jaringan Server	1
69	Jaringan internet	2
70	Maket	19
71	Almari Pendek Ruang Rapat	2
72	Backdrop Layar	3
73	Ornamen Ruang Rapat	1
74	Ampli Mixer	2
75	Pintu Sekat Rapat	1
76	Mix Meja Sound	4
77	Mix Shure	2
78	Speaker Audio	2
79	Briker Spiker	2
80	Perekam	10
81	Wirelesportable	2
82	Smart TV	2

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

C. PERMASALAHAN UTAMA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bappeda Kota Semarang secara umum antara lain sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dijelaskan sebagai berikut :

a. Mempertahankan optimalisasi tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

- 1) Kesesuaian antar dokumen perencanaan, dalam hal ini terlihat dari persentase kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD; dimana sejak tahun 2011-2013 tidak pernah mencapai 90 %, kemudian meningkat menjadi 92,05 % di tahun 2014, namun menurun menjadi 89,69 % di tahun 2015, kembali meningkat menjadi 99,63 % di tahun 2016, dan pada tahun 2017 dapat mencapai 100,00 %. Meskipun demikian, kesesuaian antar dokumen perencanaan ini harus tetap dikoordinasikan untuk terus mempertahankan capaian tersebut.
- 2) Kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan, yaitu antara RKPD dengan APBD, dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab Bappeda adalah sampai dengan tataran program, karena pada tataran kegiatan terdapat banyak faktor eksternal di luar kewenangan Bappeda. Untuk kesesuaian program antara RKPD dengan APBD tahun 2011-2016 telah menunjukkan hasil yang optimal yaitu mencapai 100,00 %. Meskipun demikian, kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan ini tetap perlu dikoordinasikan untuk terus mempertahankan capaian 100,00 % tersebut.

b. Belum optimalnya pengakomodiran usulan Musrenbang

Data yang tersedia menunjukkan belum optimalnya pengakomodiran usulan Musrenbang dalam RKPD, yaitu sebesar 17,91 % pada RKPD Tahun 2014; 91,13 % pada RKPD Tahun 2015; 68,72 % pada RKPD Tahun 2016; 70,42 % pada RKPD Tahun 2017; dan 74,23 % pada RKPD Tahun 2018. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Dalam pelaksanaan

Musrenbang tahun 2017 untuk penyusunan RKPD Tahun 2018, jumlah perempuan yang mengikuti Musrenbang masih terbatas (25,50 %), yang mana dapat menyebabkan perencanaan pembangunan yang kurang sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Dalam kurun waktu tahun 2011-2017 jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan Bappeda Kota Semarang belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Semarang, yaitu rata-rata 5 kajian penelitian per tahun. Dari jumlah tersebut juga belum dilakukan inventarisasi mengenai pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Oleh karena itu kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas, serta yang terpenting adalah upaya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, dimana nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Semarang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi Bappeda Kota Semarang, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bappeda Kota Semarang. Sub bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Bappeda Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B A B I I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SEMARANG

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

Pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebelum perubahan, telah ditetapkan tujuan utama Bappeda Kota Semarang, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran.

Seiring diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta adanya perkembangan situasi dan kondisi, kemudian mendasari dilakukannya perubahan terhadap RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan tujuan dan sasaran pembangunan serta sebagian komponen pendukungnya, sehingga perlu diikuti dengan melakukan perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang. Berkaitan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

Dari hasil telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun

2016-2021; isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang; serta tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang”**

Indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat terlihat dari ketercapaian tujuan pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dimana untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang telah ditetapkan 6 tujuan pembangunan, dengan 9 indikator tujuan. Berkaitan hal tersebut maka ditetapkan **indikator tujuan** dari Bappeda Kota Semarang, yaitu **“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Bappeda Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dimana untuk pencapaian tujuan Bappeda Kota Semarang, yaitu dengan mempertimbangan tugas fungsi Bappeda serta aturan-aturan terkait perencanaan, maka ditetapkan sasaran dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Adapun indikator capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang

Indikator ini merupakan turunan dari indikator tujuan Bappeda (persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang), dimana tujuan pembangunan Kota Semarang diharapkan dapat tercapai dengan tercapainya sasaran pembangunan Kota Semarang.

2. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu

Indikator ini merupakan representasi dari berkualitasnya perencanaan pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan bahwa perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).

3. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah

Indikator ini menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan terwujud dengan dukungan dari hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator
Dan Target Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET					TARGET AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang		INDIKATOR TUJUAN : Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	96,99	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
1	SASARAN 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	89,90	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,00
		- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

Selanjutnya perlu disusun strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam, yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu **Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan.**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data dan Informasi.

2. Pengoptimalan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya.

b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Perekonomian

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

c. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar, serta Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang.

3. Pengoptimalan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu **Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Aplikatif bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Fisik Prasarana dan Lingkungan.**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan serta Program Kerjasama Pembangunan.

4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda;

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda;

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Saranana Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan Daerah.

c. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappeda.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1. Pengoptimalan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan
		2. Pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja pembangunan	a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang pemerintahan, sosial dan budaya
			b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang perekonomian
			c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
		5. Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan
		6. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda
			b. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda
			b. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappeda

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA
KOTA SEMARANG**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Semarang pada tahun 2017.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET					TARGET AKHIR
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang		INDIKATOR TUJUAN : Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	96,99	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
1	SASARAN 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	89,90	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,00
		- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

Selanjutnya pada tahun 2017 Bappeda Kota Semarang juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota kepada Kepala Bappeda Kota Semarang, serta dari Kepala Bappeda Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja Sasaran Strategis yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

Adapun indikator kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja
pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2017
(2)	(3)		(4)
TUJUAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	INDIKATOR TUJUAN : Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang		97,00 %
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	90,00 %
	2	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100,00 %
	3	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	80,00 %

B A B I I I
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 didapatkan melalui pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2016
				TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	99,00	97,00	100,39	103,49	96,99
Capaian Indikator Tujuan						103,49	
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	92,00	90,00	106,44	118,27	89,90
	2. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,82
	3. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	80,00	87,00	108,75	76,00
	Rata – rata Capaian Indikator Sasaran					109,01	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator tujuan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 sangat tinggi, yaitu sebesar 103,49 %.

Demikian pula untuk indikator sasaran, rata-rata capaiannya juga sangat tinggi, yaitu sebesar 109,01 %. Dari ketiga indikator sasaran tersebut, masing-masing indikator juga memiliki tingkat capaian sangat tinggi, dimana terdapat 1 (satu) indikator (33,33 %) yang capaiannya 100,00 % dan terdapat 2 (dua) indikator (66,67 %) yang capaiannya melebihi 100,00 %.

2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 didapatkan melalui pengukuran terhadap indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator pada Perubahan Perjanjian Kinerja
Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2016
				TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	99,00	97,00	100,39	103,49	96,99
Capaian Indikator Tujuan						103,49	
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	92,00	90,00	106,44	118,27	89,90
	2. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,82
	3. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	80,00	87,00	108,75	76,00
	Rata – rata Capaian Indikator Sasaran					109,01	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator tujuan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 sangat tinggi, yaitu sebesar 103,49 %. Demikian pula untuk indikator sasaran, rata-rata capaiannya juga sangat tinggi, yaitu sebesar 109,01 %. Dari ketiga indikator sasaran tersebut, masing-masing indikator juga memiliki tingkat capaian sangat tinggi, dimana terdapat 1 (satu) indikator (33,33 %) yang capaiannya 100,00 % dan terdapat 2 (dua) indikator (66,67 %) yang capaiannya melebihi 100,00 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 telah ditetapkan tujuan, sasaran beserta sejumlah indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Bappeda Kota Semarang.

Adapun tujuan dari Bappeda Kota Semarang adalah **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang”** yang diukur melalui indikator “Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”. Untuk Tahun 2017, target dari indikator tujuan Bappeda ini adalah sebesar 97,00 %, dengan realisasi sebesar 100,39 % (capaian sebesar 103,49 %), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rincian Capaian Indikator Tujuan Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang
(Realisasi Indikator Tujuan Bappeda Kota Semarang) Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2017		
		TARGET	REALISASI	(%)
1	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,61	81,19	99,49
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	25,56 %	30,14 %	117,92
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,37 %	6,61 %	76,91
3	Angka Kemiskinan	4,82 %	4,62 %	104,15
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat	79,32 %	79,74 %	100,53
5	Indeks Reformasi Birokrasi	> 64	62,42	97,53
6	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	41,4 %	41,42 %	100,05
7	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	68,63 %	74,83 %	109,03
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,81 %	5,69 %	97,93
	Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang (Realisasi Indikator Tujuan Bappeda Kota Semarang)			100,39

Keberhasilan pencapaian tujuan Bappeda tersebut dicapai melalui 1 sasaran, yaitu “**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan**” dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang**
 Untuk Tahun 2017, target dari indikator sasaran Bappeda ini adalah sebesar 90,00 %, dengan realisasi sebesar 106,44 % (capaian sebesar 118,27 %) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Capaian Indikator Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang
(Realisasi Indikator 1 Sasaran Bappeda Kota Semarang) Tahun 2017

Indikator Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 1					
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,70	99,53
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,60	10,49	98,96
		Angka Harapan Hidup	Tahun	77,22	77,21	99,99
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	%	25,56	30,14	117,92
3	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,07	69,87	102,64
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	65	83,88	129,05
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang)	%	19,95	21,00	94,74
		Persentase Penanganan PMKS	%	88	99,80	113,41
5	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	79,32	79,74	100,53
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	96,41	96,04	99,62
	Misi 2					
6	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	79	78,88	99,85
		Opini BPK	Opini / Predikat	WTP	WTP	100,00
		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Pre dikat	57/CC	60,28/B	105,75
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	> 3 / ST	> 3 / ST	100,00
7	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	kejadian	2.053	1.628	120,70

Indikator Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 3					
8	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna	Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan	%	24,00	33,00	137,50
		Persentase kesesuaian tata ruang	%	81,00	81,00	100,00
9	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota	Persentase kawasan banjir dan rob	%	4,69	4,60	101,92
		Jumlah titik/ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	6	5	116,67
10	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai indeks	47,00	50,93	108,36
11	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	92,43	91,50	98,99
12	Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai indeks	172,96	173,26	99,83
	Misi 4					
13	Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan	Nilai investasi	Juta Rupiah	15.935.000	20.594.936,36	129,24
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	31,13	31,28	100,48
		Nilai Ekspor	US\$	1.277.890.977	1.278.000.000	100,01
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	7,00	7,30	104,29
14	Meningkatnya Produk Unggulan Daerah	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	27,38	27,45	100,26
		Jumlah wilayah produk unggulan daerah (Sentra / Kecamatan)	Jumlah	2	2	100,00
	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran RPJMD					106,44

2. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu

Untuk Tahun 2017, target dari indikator sasaran Bappeda ini adalah sebesar 100,00 %, dengan realisasi sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %) dengan perincian sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD sebesar 100,00 %
2. Persentase kesesuaian program antara APBD dengan RKPD sebesar 100,00 %
3. Persentase kesesuaian muatan antara Renstra dengan RPJMD sebesar 100,00 %
4. Persentase kesesuaian muatan antara Renja dengan RKPD sebesar 100,00 %
5. Persentase kesesuaian muatan antara Renja dengan Renstra sebesar 100,00 %

3. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah

Untuk Tahun 2017, target dari indikator sasaran Bappeda ini adalah sebesar 80,00 %, dengan realisasi sebesar 87,00 % (capaian sebesar 108,75 %) dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Jumlah hasil kelitbangan terpublikasi, sebesar 100,00 % (bobot 40 %)
- 2. Jumlah hasil kelitbangan tersosialisasi, sebesar 80,00 % (bobot 35 %)
- 3. Jumlah hasil kelitbangan lembaga lain yang tersosialisasi oleh Bappeda, sebesar 100,00 % (bobot 5 %)
- 4. Jumlah hasil kelitbangan yang dijadikan referensi atau acuan penelitian atau kebijakan, sebesar 100,00 % (bobot 10 %)
- 5. Jumlah hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan, sebesar 40,00 % (bobot 10 %)

Adapun keberhasilan pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diperoleh dari capaian indikator- indikator program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah, serta belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 %	98,57 %	98,57	98,33 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur” sebesar 98,57 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 % (capaian sebesar 98, 57 %). Meskipun belum memenuhi target, namun capaian dari indikator ini melebihi capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dan mebeluer.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur” sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan pelatihan Formal.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan” sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu, serta Penyusunan LKPI, LAKIP, Laporan Ikhtisar Realisasi dan Capaian Kinerja SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Renja, RKA, DPA, dan Perubahan Renstra Bappeda.

5. **Program Pengembangan Data dan Informasi**

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Program Pengembangan Data dan Informasi Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi	95,00 %	95,00 %	100,00	95,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota, dari Sisi Jumlah, Jenis dan Akurasi” sebesar 95,00 % dari yang ditargetkan sebesar 95,00 % (capaian sebesar 100,00 %). Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Semarang, yang menghasilkan Buku 8 Kelompok Data Tingkat Kota dan tingkat Kecamatan Tahun 2017, Peta Tematik Tahun 2017, Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 / 2017, serta Buku Profil Daerah Kota Semarang Tahun 2017.

6. Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar
Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)	100,00 %	100,00 %	100,00	-
2.	Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan	90,00 %	109,04 %	121,16	-
3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar yang disusun	14 dokumen	18 dokumen	128, 57	6 dokumen
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini yaitu :

- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah), sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 % (capaian sebesar 100,00 %).
- Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 109,04 % dari yang ditargetkan sebesar 90,00 % (capaian sebesar 121,16 %).
- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar yang disusun sebanyak 18 dokumen, dari yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen (capaian sebesar 128,57 %). Jumlah 18 dokumen ini merupakan akumulasi sejak tahun 2016, dimana telah disusun sebanyak 6 dokumen pada tahun 2016.

Khusus untuk tahun 2017, telah terealisasi sebanyak 12 dokumen dari 8 dokumen yang ditargetkan, yaitu :

- Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Tahun 2017
- Dokumen Evaluasi dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh dan Profil Permukiman Kumuh)
- Dokumen Identifikasi Program dan Kegiatan Rumpun Infrastruktur Berbasis Spasial

- Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Pongangan
- Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Nongkosawit
- Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Jatirejo
- Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Cepoko
- Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kelurahan Kandri

Untuk 4 dokumen lainnya merupakan dokumen tambahan yang diminta oleh pemerintah pusat (Kementerian PUPR) sebagai pedoman bagi tindak lanjut di tahun 2018, yaitu :

- Dokumen Masterplan Desa Wisata Jatibarang (dasar penyusunan DED di kawasan Desa Wisata Jatibarang)
- Dokumen Identifikasi dan Verifikasi Permukiman Kumuh Ilegal (dasar verifikasi SK Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kota Semarang serta capaian universal access)
- Dokumen Kajian Layanan Sanitasi dan dokumen Kajian Iuran Masyarakat untuk Pengelolaan Air Minum Pamsimas (dasar penghitungan universal access serta pendukung kegiatan sektor sanitasi dan air minum yang akan dibangun di Kota Semarang pada tahun 2018).

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, Replikasi PLPBK, serta Penyusunan RP2KP dan Evaluasi Penanganan Kumuh.

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah dalam pelaksanaan **Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur**. Dimana dalam pencapaian target penanganan kawasan kumuh di tahun 2017 yang harusnya sudah mampu menangani 40,00 % dari luas kawasan kumuh yang sebesar 415,83 ha, baru mampu tertangani sebesar 34,20 %. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan penanganan kumuh penyelesaiannya dilaksanakan secara kawasan/sistem sehingga untuk beberapa lokasi penanganannya dilaksanakan di luar kawasan kumuh.

Adapun solusi dan tindak lanjut yang direncanakan antara lain :

- Percepatan penanganan kawasan Kampung Bahari Tambaklorok terutama untuk pembangunan jalan, pasar tradisional dan ruang terbuka hijau.

- Memastikan penanganan kumuh di Kawasan Sawah Besar - Kaligawe dapat terealisasi di tahun 2018 sehingga capaian penanganan kumuh dapat kembali sesuai target di 2018.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.11
**Realisasi Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	100,00 %	100,00 %	100,00	99.82 %
2.	Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan	71,00 %	74,23 %	104,55	70.42 %
3.	Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan	100,00%	100,00 %	100,00	99.63 %
4.	Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini yaitu :

- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %. Capaian dari indikator ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.
 Persentase kesesuaian tersebut dicapai melalui kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan sebesar 100,00 %, dan kesesuaian program antara RKPD dengan APBD sebesar 100,00 %.
- Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan sebesar 74,23 % dari yang ditargetkan sebesar 71,00 %, dimana dari jumlah usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2017 sebanyak 4.567 usulan, 3.390 usulan telah diakomodir dalam dokumen perencanaan. Capaian dari indikator ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.
- Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %, yaitu kesesuaian dari 283 program pada RPJMD maupun pada RKPD. Capaian dari indikator ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya.

- Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan, sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %, yaitu kesesuaian dari 283 program pada RKPD maupun pada APBD. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan serta Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian)	100,00 %	100,00 %	100,00	-
2.	Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan	90,00 %	105,71 %	117,46	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini yaitu :

- Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian) sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %.
- Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 105,71 % dari yang ditargetkan sebesar 90,00 %.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP) melalui fasilitasi kelembagaan FEDEP, pelatihan, pameran, monev serta forum rembug klaster;
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, melalui koordinasi perencanaan perekonomian dalam bidang dunia usaha, ekonomi produksi maupun ekonomi makro; yang meliputi koordinasi kelembagaan FEDEP (OPD Terkait), koordinasi PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal) Kabupaten/Kota, koordinasi APVASI (Asosiasi Petani Konservasi), koordinasi PEP (Perencanaan Ekonomi Produksi), koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), serta koordinasi PEM (Perencanaan Ekonomi Makro).

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Pada kegiatan ini, hambatan dan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pengembangan ekonomi
- Dalam perencanaan OPD masih menggunakan Renstra sesuai dengan RPJMD lama, sehingga belum sinkron antara Renstra OPD dengan RPJMD Perubahan

Adapun solusi dan tidak lanjut yang direncanakan antara lain :

- Peningkatan intensitas koordinasi di dalam penyusunan program / kegiatan antar OPD dengan orientasi pada pencapaian target pada lingkup Kota Semarang
- Perlu proses adaptasi alur pikir OPD terhadap Renstra baru ke Perubahan RPJMD

b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pada kegiatan ini, hambatan dan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- Belum maksimalnya SDM di masing-masing Pokja dalam melaksanakan fungsinya pada struktur kelembagaan FEDEP sehingga belum mewadahi terealisasinya program kerja FEDEP
- Belum maksimalnya dalam mengakomodasi keinginan/ kebutuhan klaster yang tersusun dalam program kerja FEDEP ke masing-masing SKPD anggota FEDEP SKPD anggota FEDEP untuk menjadi bagian dari program/kegiatan SKPD
- Belum optimalnya peran dan fungsi FEDEP mengakibatkan belum bisa secara efektif dalam memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah Kota guna menumbuh gerakan roda perekonomian daerah
- Belum terartikulasikanya peran & fungsi FEDEP, dilingkup Stakeholder maupun masyarakat pelaku usaha sehingga ekstensi FEDEP dinilai kurang maksimal

Adapun solusi dan tidak lanjut yang direncanakan antara lain :

- Evaluasi secara periodik pelaksanaan program di kegiatan pada masing-masing Pokja
- Semua hasil Rapat FEDEP dibuat dalam berita acara, mengetahui kepala Bappeda selaku Ketua FEDEP dan kemudian diteruskan di masing-masing OPD yang masuk dalam tim FEDEP
- Program FEDEP di susun pada awal tahun

- Sinkronisasi Program FEDEP dan Program Kegiatan OPD anggota FEDEP
- Ditekankan pada OPD yang masuk tim FEDEP merupakan perwakilan dari OPD yang bersangkutan dan bukan pribadi
- Untuk penyusunan kepengurusan tim FEDEP selanjutnya di susun sebelum berakhirnya masa jabatan

9. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 3.13
**Realisasi Indikator Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Dan Sosial Budaya pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya) (%)	100 %	100,00 %	100,00	-
2.	Capaian indikator sasaran misi 1 &2 RPJMD terhadap target tahunan (%)	90,00 %	105,51 %	117,23	-
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini yaitu :

- Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya) sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %.
- Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan, sebesar 105,51 % dari yang ditargetkan sebesar 90,00 %, dengan uraian sebagai berikut :

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, yang antara lain menghasilkan Dokumen Kajian tentang Penurunan AKI, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Koordinasi Kegiatan Komda Lansia dan Kota Sehat, Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemsosbud, Dokumen Grand Design Pembangunan Kecamatan, Dokumen Renum TMMD, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Verifikasi Aksi PPK, serta Evaluasi MDG’s Kota Semarang.
- Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang antara lain menghasilkan Laporan Kinerja dan Kegiatan TKPKD, LP2KD, Buku Gerbang Hebat serta Buku Pelaksanaan dan Evaluasi Kampung Tematik.

- Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang menghasilkan Laporan tahunan Pendidikan Untuk Semua Kota Semarang Tahun 2017.
- Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) berupa monitoring GAKY pada 8 kecamatan serta Laporan Kinerja Pemantauan GAKY di Kota Semarang.

10. Program Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.14
**Realisasi Indikator Program Penelitian dan Pengembangan
 Pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah (%)	80,00 %	87,00 %	108,75	-
2.	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi, penelitian, pengembangan dan inovasi (%)	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %
Sumber Data : Bappeda Kota Semarang					

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai dalam program ini yaitu :

- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 87,00 % dari yang ditargetkan sebesar 80,00 %, yaitu melalui publikasi dan sosialisasi hasil kelitbangan, baik dari Bappeda maupun dari lembaga lain, serta pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai referensi ataupun acuan penelitian / kebijakan maupun sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan.
- Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi, penelitian, pengembangan dan inovasi sebesar 100,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga, yang menghasilkan 5 kajian penelitian yaitu :
 - Kajian Strategi Optimalisasi Pasar Tradisional di Kota Semarang
 - Kajian Indeks Kebahagiaan Kota Semarang Tahun 2017
 - Preferensi Masyarakat terhadap Kampung Tematik di Kota Semarang
 - Faktor – faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program kependudukan di Kota Semarang
 - Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anal (PPPRA) sebagai Komitmen Kota Semarang dalam Pencapaian Kota Layak Anak (KLA).

- Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang, melalui koordinasi penguatan SIDa, Dokumen Tata Laksana Penguatan SIDa, Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi dan daerah lain (best practice).
- Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian, melalui Lomba Krenova, partisipasi dalam PPI Jawa Tengah, Jurnal Riptek (2 edisi) dan Sosialisasi Hasil Litbang dari berbagai Lembaga Kelitbangan Terkait Pembangunan Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :

a. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman pentingnya SIDa di Kota Semarang khususnya di OPD-OPD Pemerintah Kota Semarang.

Adapun solusi dan tidak lanjut yang direncanakan adalah pada Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan sinkronisasi Dokumen Penguatan SIDa dengan Perubahan RPJMD Kota Semarang, Monev pelaksanaan Penguatan SIDa Kota Semarang, Diseminasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan narasumber dari pusat, provinsi, dan atau daerah lain sebagai best practice sehingga diharapkan akan ada penguatan kapasitas SDM dalam pemahaman dan penerapan SIDa serta fasilitasi dan koordinasi Penguatan SIDa Kota Semarang (TKK, Tim Pokja, dan Sekretariat).

b. Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi :

- Kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti Lomba Krenova Kota Semarang,
- Belum dimanfaatkannya secara maksimal hasil temuan dari Lomba Krenova,
- Masih sulitnya menjangkau artikel sebagai materi Jurnal Riptek.

Adapun solusi dan tidak lanjut yang direncanakan adalah akan meningkatkan upaya sosialisasi Lomba Krenova Kota Semarang serta Jurnal Riptek.

c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Adapun solusi dan tidak lanjut yang direncanakan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian beserta publikasi dan sosialisasi hasil penelitian, termasuk hasil penelitian dari luar Pemerintah Kota Semarang.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Bappeda Kota Semarang bukan merupakan perangkat daerah penghasil, sehingga tidak memiliki target dan realisasi pendapatan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2017, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Bappeda Kota Semarang adalah sebesar **Rp 22.438.838.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 20.417.192.587,- (90,99 %)**. Anggaran tersebut terdiri dari :

- 1. **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp 9.449.072.000,-** , dengan realisasi sebesar **Rp 8.841.725.509,- (93,57 %)**
- 2. **Belanja Langsung** sebesar **Rp 12.989.766.000,-** , dengan realisasi sebesar **Rp 11.575.467.078,- (89,11 %)**

Terkait hal tersebut, pada Bappeda Kota Semarang hanya terdapat 1 (satu) tujuan yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang”, serta 1 (satu) sasaran yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”; sehingga keseluruhan alokasi beserta realisasi anggaran tersebut di atas, utamanya anggaran Belanja Langsung, dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	JUMLAH ANGGARAN BAPPEDA	22.438.838.000	20.417.192.587	90,99	2.021.645.413
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.449.072.000	8.841.725.509	93,57	607.346.491
	Belanja Pegawai	9.449.072.000	8.841.725.509	93,57	607.346.491
1	Gaji dan Tunjangan	4.502.802.000	4.313.737.014	95,80	189.064.986
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.946.270.000	4.527.988.495	91,54	418.281.505

NO	URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
	BELANJA LANGSUNG	12.989.766.000	11.575.467.078	89,11	1.414.298.922
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.153.701.000	2.804.455.051	88,93	349.245.949
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.500.000	39.056.500	91,90	3.443.500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	19.851.864	66,17	10.148.136
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	15.000.000	9.344.450	62,30	5.655.550
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	8.980.000	35,92	16.020.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000	38.566.970	59,33	26.433.030
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.000.000	33.061.900	71,87	12.938.100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	915.000	18,30	4.085.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	13.829.100	92,19	1.170.900
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	687.300	68,73	312.700
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	47.500.000	34.441.920	72,51	13.058.080
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	2.793.467.000	2.538.556.616	90,87	254.910.384
12	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	68.234.000	67.163.431	98,43	1.070.569
B	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	729.178.000	551.192.337	75,59	177.985.663
1	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	452.178.000	367.807.423	81,34	84.370.577
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	275.000.000	182.857.414	66,49	92.142.586
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	2.000.000	527.500	26,38	1.472.500
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	289.850.000	151.021.400	52,10	138.828.600
1	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal	289.850.000	151.021.400	52,10	138.828.600

NO	URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	250.570.000	241.056.400	96,20	9.513.600
1	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu	229.570.000	229.355.000	99,91	215.000
2	Penyusunan LKPJ SKPD	1.000.000	747.400	74,74	252.600
3	Penyusunan LAKIP	1.000.000	722.400	72,24	277.600
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	743.000	74,30	257.000
5	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	4.000.000	818.000	20,45	3.182.000
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.000.000	547.100	54,71	452.900
7	Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000	602.100	60,21	397.900
8	Penyusunan Renja Skpd	4.000.000	2.258.000	56,45	1.742.000
9	Penyusunan RKA Skpd dan DPA Skpd	4.000.000	2.903.000	72,58	1.097.000
10	Penunjang Riview dan Revisi Renstra PD	4.000.000	2.360.400	59,01	1.639.600
E	Program Pengembangan Data Informasi	100.000.000	95.581.950	95,58	4.418.050
1	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Kota Semarang	100.000.000	95.581.950	95,58	4.418.050
F	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	2.809.817.000	2.602.967.890	92,64	206.849.110
1	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	239.300.000	222.457.600	92,96	16.842.400
2	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	700.000.000	574.451.840	82,06	125.548.160
3	Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	648.592.000	605.735.450	93,39	42.856.550
4	Penyusunan PR2KP dan Evaluasi Penanganan Kumuh	495.710.000	488.312.500	98,51	7.397.500
5	Replikasi PLPBK	726.215.000	712.010.500	98,04	14.204.500
G	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.678.000.000	2.456.151.900	91,72	221.848.100
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.546.900.000	1.401.755.650	90,62	145.144.350
2	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1.131.100.000	1.054.396.250	93,22	76.703.750

NO	URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	SELISIH (Rp)
H	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	619.600.000	611.788.100	98,74	7.811.900
1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	310.000.000	307.332.600	99,14	2.667.400
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	309.600.000	304.455.500	98,34	5.144.500
I	Program Penelitian dan Pengembangan	696.350.000	654.105.050	93,93	42.244.950
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	283.910.000	279.273.400	98,37	4.636.600
2	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang	62.290.000	56.880.400	91,32	5.409.600
3	Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	350.150.000	317.951.250	90,80	32.198.750
J	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1.662.700.000	1.407.147.000	84,63	255.553.000
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	937.700.000	925.066.400	98,65	12.633.600
2	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	545.000.000	335.531.150	61,57	209.468.850
3	Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (Pus)	100.000.000	76.565.000	76,57	23.435.000
4	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (Gaky)	80.000.000	69.984.450	87,48	10.015.550

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2017, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Bappeda Kota Semarang adalah sebesar **Rp 22.438.838.000,-** . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp 20.417.192.587,- (90,99 %)** dengan sisa sebesar **Rp 2.021.645.413,- (9,01 %)** dengan perincian sebagai berikut :

1. **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp 9.449.072.000,-** , dengan realisasi sebesar **Rp 8.841.725.509,- (93,57 %)** dan sisa sebesar **Rp 607.346.491,- (6,43 %)**.

Untuk Belanja Tidak Langsung, selisih anggaran disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan dengan jumlah pegawai serta aturan yang berlaku.

2. **Belanja Langsung** sebesar **Rp 12.989.766.000,-** , dengan realisasi sebesar **Rp 11.575.467.078,- (89,11 %)** dan sisa sebesar **Rp 1.414.298.922,- (10,89 %)**

Untuk Belanja Langsung, selisih anggaran umumnya dikarenakan efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar. Selain itu juga terdapat kegiatan yang sebagian dari kegiatannya (sub kegiatan) tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal serta Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Semarang.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Bappeda Kota Semarang pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Untuk Indikator Tujuan, dari target sebesar 97,00 % telah terealisasi sebesar 100,39 %, sehingga capaiannya sebesar 103,50 %.
2. Untuk Sasaran yang terdiri dari 3 indikator, rata-rata capaian indikatornya adalah sebesar 109,00 % (1 indikator capaiannya 100,00 % sementara 2 indikator lainnya melebihi 100,00 %).

B. Pada tahun 2017 alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian sasaran adalah sebesar Rp 12.989.766.000,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.575.467.078,- (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 89,11 %. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Bappeda Kota Semarang pada Tahun 2017 sudah cukup efisien.

Dari ulasan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang sudah cukup optimal. Selanjutnya capaian yang sudah cukup baik tersebut perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Bappeda Kota Semarang; sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Semarang, 2018
KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Ir. BAMBANG HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580410 198603 1 010